

Potret Moderasi Beragama pada Masyarakat Muslim Minoritas Etnis Tionghoa di Yogyakarta

Imam Machali¹, Faiq Ilham Rosyadi^{2*}

¹²UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*corresponding author: faiqilhamrosyadi@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dimensi moderasi beragama pada masyarakat muslim minoritas etnis Tionghoa di Yogyakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua DPW PITI D.I. Yogyakarta, Hj. Sioe Fen / Hj. Budi untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan PITI dari tahun ke tahun. Kemudian Ketua PITI Sleman, Ibu Linda Lestari dan Wakil Ketua Bapak Bambang Bergen serta salah satu anggota PITI Bapak Hendrik. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen resmi organisasi, referensi-referensi artikel ilmiah, buku dan tulisan lain yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Adapun analisis yang digunakan mengadopsi model analisis model analisis kualitatif dari Miles dan Huberman dengan prosedur yang ditempuh adalah melalui reduksi data (*data reduction*), sajian data (*data display*) dan pengembalian kesimpulan (*conclusion drawing*). Dimensi moderasi beragama masyarakat muslim minoritas etnis Tionghoa di Yogyakarta setidaknya tergambar melalui dua hal pokok. Pertama menyangkut paham keagamaan yang dianut. Kedua berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Pada dimensi paham keagamaan, masyarakat muslim Tionghoa di Yogyakarta didominasi oleh pengaruh ormas setempat. Dalam hal ini ormas NU dan Muhammadiyah merupakan dua ormas yang paling banyak diikuti. Sedangkan dalam hal sosial, toleransi antar umat beragama merupakan kunci menjaga kerukunan dalam masyarakat. Sikap toleran diwujudkan dalam berbagai bidang, seperti keagamaan dan sosial.

Kata Kunci: Muslim Tionghoa, Yogyakarta, Moderasi beragama, Toleransi.

Abstract: This study aims to explore the dimensions of religious moderation in the Chinese ethnic minority Muslim community in Yogyakarta. This research is a type of field research with a descriptive-analytical qualitative method. The primary data source in this study was the Chairperson of the PITI DPW D.I. Yogyakarta, Hj. Sioe Fen / Hj. Budi to get information about the development of PITI from year to year. Then the Chairperson of PITI Sleman, Mrs. Linda Lestari and Deputy Chairman Mr. Bambang Bergen and one of the members of PITI Mr. Hendrik. The secondary data sources in this study are official organizational documents, scientific articles, books and other writings that are relevant to the focus of the research problem. To ensure the validity of the data, this study used source triangulation techniques and technical triangulation techniques. The analysis used adopts the analysis model of the qualitative analysis model from Miles and Huberman with the procedures taken

are through data reduction, data display and conclusion drawwing. The dimension of religious moderation of the Chinese ethnic minority Muslim community in Yogyakarta is illustrated at least through two main points. The first concerns the religious understanding adopted. The second relates to inter-religious harmony. In the dimension of religious understanding, the Chinese Muslim community in Yogyakarta is dominated by the influence of local mass organizations. In this case, the NU and Muhammadiyah organizations are the two most followed organizations. Meanwhile, in social terms, tolerance between religious communities is the key to maintaining harmony in society. Tolerance is manifested in various fields, such as religious and social.

Keywords: Chinese Muslim, Yogyakarta, Religious Moderation, Tolerance.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah salah satu potret bangsa yang memiliki kekayaan budaya beserta dengan kemajemukannya. Ribuan budaya, berbagai macam agama, beragam bahasa, dan tradisi adalah sumber khazanah peradaban di satu sisi. Namun di sisi yang lain, keragaman dapat menjadi potensi konflik yang pada akhirnya dapat mengancam keharmonisan kehidupan masyarakat. Bahkan keberagaman ini telah tumbuh sebelum Indonesia diakui menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Salah satu faktor tumbuhnya keberagaman ini adalah banyaknya orang non-pribumi yang menjelajahi sudut-sudut wilayah Indonesia. Sebelum Belanda menjajah dan menjelajah Indonesia, orang-orang yang berasal dari Arab, Cina, Portugis, India sudah terlebih dulu menjelajahi Indonesia, meskipun dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Kemudian pada periode penjajahan Belanda, jumlah imigran semakin membengkak dan sulit dikendalikan, sehingga Belanda membuatkan perkampungan tersendiri. Ada kampung Cina, kampung Arab, kampung keeling, sehingga Belanda lebih mudah mengontrol dan menjauhkan mereka dari pribumi.

Semua etnis yang masuk Indonesia mengharapkan kehidupan yang nyaman, termasuk salah satunya adalah etnis Tionghoa. Tidak sedikit di antara mereka yang nekat, yang hanya bermodalkan keyakinan datang ke Indonesia tanpa ada kenalan apalagi keluarga. Mereka rela meninggalkan kampung halaman dengan penuh harapan mampu membangun kehidupan yang lebih baik. Etnis Tionghoa yang sudah berhasil membangun kehidupannya di Indonesia, tidak ingin kembali dan mereka justru ingin tinggal selamanya di Indonesia. Padahal sejak zaman Belanda, kehidupan etnis Tionghoa seringkali mengalami diskriminasi, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam relasi sosial kemasyarakatan.

Begitu Indonesia merdeka, diskriminasi justru semakin terlihat, mereka dibantai habis-habisan pada tahun 1965, dengan alasan terlibat dalam menyokong dan mentransmisikan ideologi komunis di Indonesia. Persoalan ideologi inilah yang menjadi salah satu di antara beberapa penyebab terhambatnya asimilasi dan justru menimbulkan diskriminasi. Siswono Yudo Husodo berpendapat bahwa diskriminasi dan kerusuhan anti Tionghoa disebabkan oleh perbedaan kepercayaan/agama, adat istiadat, perbedaan status sosial, perbedaan tingkat penghasilan, dan keyakinan politik. Ditambah lagi munculnya prasangka orang-orang anti komunis yang menyamakan komunisme dengan Cina selama masa Sukarno. Ideologi komunis dianggapnya satu paket dengan orang-orang Tionghoa di Indonesia, karena Suharto mempersepsikan bahwa RRC mendukung PKI dan berada di balik G30S.

Pada pemerintahan orde baru, kebijakan pada etnis Tionghoa semakin kejam, mereka diharuskan berasimilasi dan melepaskan diri dari baju ketionghoannya. Akibatnya, mereka tidak diperbolehkan memakai nama Tionghoa, sekolah-sekolah Tionghoa ditutup, media Tionghoa dilarang, perayaan hari-hari besar Tionghoa dilarang. Usaha ini juga untuk memutus pengaruh Cina, agar etnis Tionghoa Indonesia tidak terpengaruh dengan komunisme. Di penghujung kekuasaan rezim ini, tepatnya pada Mei 1998, penderitaan orang-orang Tionghoa belum berkesudahan. Justru mereka kembali menjadi korban dari amukan demonstran yang sangat keji. Leo Suryadinata menggambarkan bahwa kerusuhan anti Tionghoa meledak di beberapa daerah, sedangkan kejadian yang paling parah tersorot di daerah Jakarta. Toko-toko milik etnis Tionghoa dijarah, dirampok, dan dibakar habis, kemudian para perempuan muda maupun setengah baya disiksa, diperkosa, dan dibunuh oleh oknum-oknum.

Pada akhirnya politik demokratis diberlakukan, kebebasan pers mulai diterapkan, otonomi daerah, melahirkan komnas perempuan. Kebijakan-kebijakan yang khusus terhadap Tionghoa dan secara umum, membuat etnis Tionghoa bisa berekspresi di ranah publik. Diskriminasi sudah terpengkas, gerakan organisasi Tionghoa dan partai Tionghoa mulai didirikan. Menurut Leo Suryadinata ada 100 partai lebih, tiga di antaranya dari Tionghoa, yaitu Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti), Partai Pembauran Indonesia dan Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI). Sedangkan organisasi non-partai alias LSM Tionghoa yang pertama adalah Paguyuban Marga Sosial Tionghoa Indonesia (PMSTI), ada lagi Perhimpunan Keturunan Tionghoa Indonesia (INTI), Gandi,

Solidaritas Nusa-Bangsa, SIMPATIK, yang didirikan khusus untuk memberantas diskriminasi rasial di Indonesia.

Sejatinya, organisasi Tionghoa yang khusus Islam juga mulai memperbaiki program-programnya untuk dapat hidup berdampingan secara harmonis. Sejak didirikan di Jakarta, organisasi muslim Tionghoa ini dinamakan persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). PITI didirikan pada 1961, haluan politiknya pada masyumi, dan membangun ikatan erat dengan Muhammadiyah, yang pada saat itu mengusung purifikasi agama. Hal ini dipengaruhi oleh ketua pertama Abdul Karim Oey, yang pada saat itu menjadi aktivis Muhammadiyah dari Bangka dan kemudian hijrah ke Jakarta. Setiap kegiatan PITI tidak lepas dari agenda Muhammadiyah, ibaratkan PITI pada saat itu tangan panjang dari Muhammadiyah (meskipun banyak yang tidak mengakuinya).

Berbicara mengenai moderasi beragama muslim Tionghoa di organisasi PITI ini merupakan hal yang menarik dan jarang menjadi fokus kajian. Banyak tokoh dan peneliti Tionghoa, termasuk Leo Suryadinata, Ong Hok Ham, Mely G. Tan, Usman Pelly, yang menyatakan bahwa tionghoa itu tidak homogen, tetapi heterogen. Kecenderungan ideologi menjadi sulit ditebak, karena tidak ada kebijakan khusus untuk mendoktrin mereka agar loyal terhadap ideologi tertentu. Apapun pengetahuan dan pengalaman muslim Tionghoa, khususnya di PITI menurut Karl Manheim memiliki dimensi abstrak dan dimensi sosial. Dimensi abstrak ini merupakan pengetahuan yang berada dalam tahap pemikiran, sedangkan dimensi sosial merupakan ekspresi pemikiran melalui interaksi sosial di masyarakat. Atas dasar hal tersebut, dimensi moderasi beragama pada minoritas muslim etnis Tionghoa di Yogyakarta penting untuk ditelaah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan titik temu pada kesadaran beragama masyarakat minoritas yang melekat padanya etnis tertentu. Lebih penting, agar keharmonisan beragama pada etnis tertentu dan pribumi dapat dijaga keberlangsungannya. Sebab, sekat-sekat antara etnis Tionghoa dengan Pribumi sampai saat ini masih sangat kental, bahkan di antara sesama muslim.

Organisasi PITI sebagai wadah muslim Tionghoa, menjadi objek yang menarik untuk ditelusuri dimensi moderasi agama dan sosialnya. Di antara sekian banyak DPW dan DPP PITI di Indonesia, DPW PITI Yogyakarta yang masih menarik untuk diteliti. Pemilihan ini didasarkan pada; *pertama*, aspek historis yang menunjukkan keharmonisan antara Tan Jin Sing dan Keraton dalam membangun Yogyakarta. *Kedua*, penolakan terhadap ideologi komunis dan terbukanya transmisi ideologi-ideologi lain ke

PITI. *Ketiga*, pertarungan wacana tentang ideologi banyak terjadi di PITI, terlebih pasca orde baru. *Keempat*, citra eksklusif dari muslim Tionghoa masih menonjol dalam pandangan masyarakat. *Kelima*, PITI Yogyakarta termasuk salah satu DPW tertua di Indonesia, yang didirikan pada tahun 1970 di bawah kekuasaan orde baru. Abdul Karim Oey, ketua pertama PITI menjelaskan bahwa di tahun 1970 sudah ada sebelas DPW PITI, yaitu di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung Hampir lima dekade PITI Yogyakarta mewarnai dakwah Islamiyah di kalangan Tionghoa, yang rata-rata mualaf.

Meskipun seringkali minoritas dipertentangkan dengan masyarakat mayoritas, namun partisipasi PITI DIY secara nyata mereka telah berperan sebagai jembatan budaya dan memberikan corak baru terhadap identitas kota Yogyakarta. Salah satu contohnya, program perayaan Imlek bersama dari berbagai etnis dan agama. Program tersebut diisi oleh beragam kegiatan seperti pameran, pentas, dan pengajian. Perayaan imlek berperan penting dalam menciptakan dialog terbuka dan interaksi positif antar umat beragama. Dalam terma budaya, minoritas muslim etnis Tionghoa berfungsi sebagai cultural broker (jembatan budaya). Mereka mampu menjembatani kerukunan antar etnis Tionghoa dan pribumi Yogyakarta. Bahkan sampai batas tertentu, mereka melakukan penyerbukan budaya. Maksudnya adalah imlek mengadopsi ajaran dari budaya Tionghoa dan juga budaya Islam seperti maulid Nabi SAW. Dalam konsep pembangunan, adopsi budaya baru dapat berperan positif dalam menyatukan dan mempererat keharmonisan.

Dengan demikian dalam menghadapi masyarakat majemuk, senjata yang paling ampuh untuk mewujudkan bangsa yang harmonis dengan spirit kemanusiaan adalah melalui paham agama dan sikap yang moderat. Berdasarkan hal tersebut, menjadi penting mengkaji secara sistematis tentang bagaimana moderasi agama dan budaya minoritas etnis Tionghoa di Yogyakarta, dalam rangka menemukan dan mewujudkan titik temu antar budaya, kelompok masyarakat, dan dimensi keagamaan, kemanusiaan dan keindonesiaanya. Sehingga kajian mengenai moderasi beragama etnis Tionghoa, merupakan salah satu bentuk kajian yang seharusnya dikaji secara akademik dengan segala bentuk heterogenitas dan unsur pluralitas yang meliputi masyarakat Yogyakarta. Dengan adanya temuan pada kajian tentang potret moderasi beragama di PITI Yogyakarta, diharapkan mampu memberikan role model moderasi beragama yang mampu diterapkan di berbagai wilayah Indonesia.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini memakai pendekatan sosiologi, peneliti menggunakan logika-logika dan teori sosiologi baik klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain. Pendekatan ini juga merupakan cara pandang terhadap perilaku manusia yang merupakan cerminan kondisi kejiwaan manusia. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua DPW PITI D.I. Yogyakarta, Hj. Sioe Fen / Hj. Budi untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan PITI dari tahun ke tahun. Kemudian Ketua PITI Kab. Sleman, Ibu Linda Lestari dan Wakil Ketua PITI Kab. Sleman Bapak Bambang Bergen serta salah satu anggota PITI Bapak Hendrik. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen resmi organisasi, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian. Adapun yang tergolong sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal ilmiah maupun reserach report yang berhubungan dengan keberadaan mulism etnis Thionghoa dan moderasi beragama bagi minoritas muslim Tionghoa di Indonesia, terutama tentang moderasi beragama bagi minoritas muslim Tionghoa di Yogyakarta.

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data semacam ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman yang maksimal dari perspektif masyarakat yang diteliti bukan dari perspektif pengamat atau peneliti. Untuk menjamin keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangusumber dan triangulasi teknik. Dalam menganalisi data, peneliti menggunakan model analisis kualitatif dari Miles dan Huberman dengan prosedur yang ditempuh adalah melalui reduksi data (*data reduction*), sajian data (*data display*) dan pengembalian kesimpulan (*conclution drawwing*).

Pembahasan

Menelusuri Keberadaan Muslim Etnis Tionghoa di Yogyakarta

Awal mula keberadaan muslim etnis Tionghoa sejatinya telah banyak diulas oleh pakar dan akademisi. Awal keberadaan muslim Tionghoa ke Pulau Jawa dan Yogyakarta telah dijelaskan dalam buku Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI antara Historisitas dan Mitos. Buku ini ditulis oleh H. J. De Graaf dkk., bertujuan untuk mengomentari teks Catatan Tahunan Melayu Semarang dan Cirebon atau Malay Annals yang tertuang dalam

buku Tuanku Rao karya Mangaradja Onggan Parlindungan. Dalam catatan tersebut, dijelaskan bahwa pada tahun 1413 armada Tiongkok Dinasti Ming singgah di Semarang selama satu bulan untuk memperbaiki kapal yang rusak. Tiga tokoh muslim yaitu Haji Sam Po Bo, Haji Mah Wang, dan Haji Feh Tsin, melaksanakan shalat di masjid Tionghoa Hanafi Semarang.

Buku senada ditulis oleh Slamet Muljana dengan judul Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara. Buku ini menjelaskan bahwa kerajaan Islam pertama di Nusantara didirikan oleh keturunan Tionghoa, yaitu Jin Bun yang diduga sebagai Reden Patah. Kemudian ia juga berpendapat bahwa sebagian walisongo merupakan keturunan Tionghoa. Oleh karena itu, Tionghoa sangat berperan besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Pendapat ini didasarkan pada satu sumber, yaitu Catatan Tahunan Melayu Semarang dan Cirebon yang tertuang dalam buku Tuanku Rao karya Mangaradja Onggan Parlindungan. Sumanto Al-Qurtuby menjelaskan bahwa Malay Annals ditolak secara serentak oleh sejarawan, karena dianggap melawan arus keumuman tentang sejarah Islamisasi di Jawa. Buku Slamet Muljana tersebut mendapat sorotan dari pemerintah dan dilarang beredar. Sumanto merespon penolakan terhadap Malay Annals dengan sinis, ia mengutip pepatah “kemarau setahun, dihapus hujan sehari”, ia juga mengatakan penolakan itu sebagai “Kecerobohan Intelaktual” yang mengakibatkan indormasi berharga dari Malay Annals terabaikan.

Sumanto justru ingin menggali dan membandingkan dengan pendapat tokoh lain, ia berpendapat bahwa keterlibatan Cina dalam penyebaran Islam di Jawa bukanlah hal baru. Ia menjelaskan bahwa sebelum Parlindungan dan Muljana ada Pangeran Hadiwijdaja yang berpendapat bahwa para penyebar Islam di Jawa memiliki nama Cina. Ia tidak memungkiri peranan orang Cina dalam Islamisasi di Jawa, justru peranannya tidak berhenti pada pendirian Demak, tetaju juga terus mengawal sejarah kekuasaan Demak. Terjadinya Islamisasi di Jawa oleh Walisongo sangat memungkinkan juga terjadi berbagai daerah, termasuk Yogyakarta. D.I. Yogyakarta awalnya bagian dari kerajaan Mataram. Muslim Tionghoa yang tersebar di berbagai daerah mulai masuk ke Yogyakarta melalui jalur darat dan untuk kepentingan ekonomi. Pater Carey dalam bukunya Orang Jawa dan Masyarakat Cina 1755-1825 menggambarkan bahwa sejak 1756 terjadi kesepakatan penyewaan pajak jalan antara Sultan Hamengku Buwana I dengan To In.

To In diangkat menjadi kapiten untuk mengelola pemukiman Tionghoa di Yogyakarta. Jaminan keamanan yang diberikan keraton menarik minat orang-orang Tionghoa untuk datang dan berbisnis di Yogyakarta, baik dari Semarang, Kedu, Banyumas, dan ada yang langsung datang dari Tiongkok. Satu dari sekian banyak pendatang ada yang bernama Oei Tek Ho dari Banyumas, ia merupakan saudara dari kapiten Kedu Oei Tek Liong. Kemudian jabatan kapiten ini diserahkan kepada anak angkatnya yang bernama Tan Jin Sing. Potensinya sebagai kapiten Kedu, banyak membawa kemajuan bagi masyarakat Tionghoa, sehingga menarik dirinya menjadi kapiten Yogyakarta menggantikan Oie Tek Ho. Ia juga diangkat menjadi Bupati Yogyakarta sebagai balas jasa Sultan karena telah berhasil memberikan banyak pemasukan ke Keraton. Pasca pengangkatan ini, Tan Jin Sing pindah agama Islam dan berjuang untuk kemajuan Islam di Yogyakarta.

Dalam tahap selanjutnya, peraturan kependudukan Kesultanan Yogyakarta mengharuskan penggunaan identitas Islam dan Jawa bagi yang ingin menjadi kawula Sultan. Selama keamanan terjamin dan bisa berkontribusi untuk keraton, orang-orang Tionghoa menerima hal itu, sehingga banyak yang masuk Islam. Pemukiman awalnya di Beskalan, Poncowinatan, dan Ketandan, mereka mengembangkan perekonomian secara bersama-sama. Awalnya, orang Tionghoa masuk Islam hanya karena untuk memenuhi syarat identitas keislaman, agar bisa mudah tinggal di Yogyakarta. Namun bagi Tionghoa, komitmen untuk masuk Islam harus disertai dengan ekspresi keimanan juga, sehingga mereka bisa istiqomah dan memproklamkan tentang identitas muslim Tionghoa.

Pada perkembangan selanjutnya, penyebab keislaman seseorang bukan karena adanya peraturan tersebut. Melalui buku *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia Pergulatan Mencari Jati Diri*, Afthonul Afif menjelaskan bahwa penyebab keislaman orang Tionghoa itu ada dua, pertama orang Tionghoa menganggap bahwa Islam sebagai jawaban akhir dari rangkaian proses pencarian atas krisis eksistensial. Kedua, masuk Islam adalah takdir yang tidak bisa ditolak. Afif lebih lanjut menjelaskan bahwa Islam menjadi faktor kunci dalam pembentukan identitas sosial orang-orang Tionghoa. Setiap keputusan berkonsekuensi pada perubahan, mereka harus mengidentifikasi dirinya dengan pandangan yang baru dan melakukan hal-hal yang merepresentasikan identitas dirinya yang baru. Identitas baru ini membuat pribumi lebih mudah menerima orang Tionghoa, sehingga mereka bisa mengembangkan identitasnya dengan lebih terbuka dan lentur.

Identitas yang baru itu mengarahkan pada organisasi yang baru, sebagai upaya memperkuat identitasnya. Rezza Maulana dalam studinya menjelaskan bahwa menjadi muslim bagi Tionghoa bukanlah hal yang aneh. Apalagi di negeri Tiongkok sana, termasuk Ceng Ho bangga dan memperjuangkan identitasnya dengan baik. Orang Tionghoa yang sudah masuk Islam diwadahi oleh organisasi yang bernama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). PITI Pusat didirikan pada 1961, sedangkan di Yogyakarta didirikan pada 20 September 1970.

Rezza Maulana tampaknya sependapat dengan Afif tentang kelenturan dan keterbukaan muslim Tionghoa. Maulana berpendapat bahwa organisasi PITI secara institusi tidak berafiliasi kepada ormas dan partai politik tertentu. PITI lebih tidak fanatik dalam menentukan pandangan politiknya, serta tidak memaksakan setiap anggotanya untuk aktif di salah satu ormas maupun partai. Adapun keterlibatan ketua PITI periode 1984-2003 Budi Styagraha dalam PAN, murni bersifat personal. PITI membebaskan anggotanya yang ingin berproses di manapun, asalkan membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Organisasi PITI menyusun program pemberdayaan sosial untuk memperkenalkan identitas islamnya dan meningkatkan partisipasinya di ranah sosial. Sunano dalam buku Muslim Tionghoa di Yogyakarta menjelaskan bahwa publikasi identitas sebagai upaya untuk meniadakan diskrimasi dan penindasan structural muslim Tionghoa. Sunano merinci partisipasi muslim Tionghoa menjadi dua masa, yaitu sebelum berdirinya PITI dan sesudah berdirinya PITI. Sebelum berdirinya PITI, Sunano sangat miskin data, ia hanya menggambarkan aktivitas Tan Jin Sing, Ko Mo An pada 1920 an, Tjan Tjoe Siem, Tjan Tjoe Som. Satu informasi yang patut diapresiasi saat muslim Tionghoa berpartisipasi dalam kegiatan kongres Muslimin Indonesia pada 25-30 Desember 1949 di Yogyakarta. Muslim Tionghoa memberikan sumbangan biaya kongres, menyediakan konsumsi, transportasi dan penginapan. Tidak ada delegasi dari Yogyakarta sendiri, karena pada saat itu belum ada yang konsen di organisasi sebagai cendekiawan atau ulama.

Pasca PITI didirikan di Yogyakarta pada 20 September 1970, partisipasinya dalam bidang dakwah mulai terlihat. "Para mualaf dididik dengan baik, setiap malam sabtu diadakan pengajian giliran yang diisi oleh para da'i profesional" (Wawancara, Ketua PITI DIY, 2019). Pada kepemimpinan Budi Setyagraha, pengajian ini tetap dilestarikan, meskipun kadang sampai ke pelosok-pelosok desa. Kerjasama pengajian pernah dilakukan dengan Yayasan Tunas Mlati, jamaah Muhtadin dan An-Nahl. Pengajian di TVRI

bersama AR. Fachruddin dan Azhar Basyir. Sudah 23 tahun lebih pengajian ini terlaksana, sehingga selalu mengalami perubahan signifikan. Saat ini, pengajian seringkali dilakukan bersamaan dengan perayaan budaya Tionghoa, seperti Imlek. Partisipasi dalam kegiatan sosial dilaksanakan dengan mengadakan pasar murah, bantuan air bersih, bakti sosial di daerah gunung kidul dan Sleman, pengobatan gratis, buka puasa bersama, santunan pada anak yatim, perbaikan, dan pembangunan masjid. Kegiatan dan program sosial tidak luput dari PITI, terlebih semua itu untuk kemajuan dan kemaslahatan umat Islam di Yogyakarta.

Di lain sisi, PITI Yogyakarta pernah berperan meredamkan peristiwa yang berpotensi menjadi konflik besar, yaitu ancaman kerusuhan. Dua puluh tahun silam, ketika Toko Gardena terbakar dengan kobaran api yang menakutkan hingga membuat para tetangga di sekelilingnya khawatir kalau-kalau rumah dan tokonya turut terbakar PITI Yogyakarta hadir dengan berbagai upayanya mengatasi konflik yang terjadi. Berkat jerih payah PITI Yogyakarta, kini ancaman kerusuhan tersebut tidak terulang kembali.

Pada dekade terakhir ini, organisasi PITI jauh lebih tertata dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Pembinaan anggota, pengajian rutin, kegiatan-kegiatan sosial, kerjasama dengan organisasi Tionghoa dan organisasi pribumi terus digencarkan guna membangun kerukunan antar umat beragama. Hal tersebut menandakan bahwa kehidupan yang harmonis antar umat beragama merupakan satu hal yang terus dijaga oleh PITI Yogyakarta.

Paham Keagamaan Minoritas Muslim Etnis Tionghoa di Yogyakarta

Sebagai bangsa yang plural, Indonesia memiliki sumber kekayaan budaya dan paham keagamaan yang bermacam-macam. Lebih jauh, sumber kekayaan tidak terbatas hanya pada budaya saja, melainkan juga ras, suku, bahasa dan ritual keagamaan. Dalam ragam agama yang ada, kejadian beberapa waktu yang lalu menyuguhkan kesan bahwa agama sangat berpotensi menjadi alat provokasi. Pada batas tertentu, dapat menimbulkan gesekan, kegaduhan dan ketegangan antar sesama. Dalam kasus yang demikian, sikap eksklusif dapat memperparah keadaan. Sikap bersikeras pada paham pribadi dan menganggap salah pendapat orang lain adalah persoalan serius yang harus dibenahi. PITI Yogyakarta misalnya, sebagai sebuah organisasi muslim minoritas mereka memegang prinsip islam rahmatan lil alamin. Keberagaman dan multibudaya yang ada di

PITI Yogyakarta merupakan di satu sisi sebagai sebuah kekayaan namun di sisi yang lain bisa menjadi faktor ketegangan.

Kekayaan paham keagamaan yang berkembang di PITI Yogyakarta dan minoritas muslim etnis Tionghoa dibanyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Organisasi masyarakat, ritual keagamaan masyarakat sekitar memegang pengaruh besar pada paham yang dianut oleh masyarakat minoritas muslim etnis Tionghoa di Yogyakarta. Pada saat tertentu, paham keagamaan yang dianut dipengaruhi oleh bimbingan dan pemikiran ormas-ormas yang berperan aktif dalam kegiatan PITI Yogyakarta.

Mayoritas paham keagamaan masyarakat minoritas muslim Tionghoa di Yogyakarta mengikuti organisasi masyarakat besar yang ada di Indonesia. Meski begitu ada beberapa masyarakat muslim Tionghoa yang mengikuti paham keagamaan yang dianut oleh Majelis Tafsir Al-Quran (MTA), Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Dapat dikatakan bahwa paham keagamaan masyarakat Tionghoa yogyakarta cukup beragam dengan didominasi oleh paham organisasi masyarakat besar di Indonesia. Hal tersebut disebabkan mereka mengikuti paham ormas yang berkembang dalam masyarakat. Melihat keadaan tersebut relevan dengan keadaan organisasi masyarakat yang memiliki pengikut terbanyak saat ini yakni NU dan Muhammadiyah.

Oleh karena itu, sebenarnya muslim minoritas etnis Tionghoa tidak tertutup dengan keadaan dan paham keagamaan yang berkembang di masyarakat. Mereka mengikuti ajaran dan ajakan yang mereka terima dalam interaksi sosial mereka. Untuk menjaga keberlangsungan dan kerukunan antar umat beragama yang memiliki paham berbeda mereka mengedepankan toleransi dan saling memahami.

PITI sebenarnya organisasi yang terbuka dan dengan senang hati bekerjasama dengan organisasi lain. Keterbukaan ini justru mengaburkan kecenderungan-kecenderungan PITI, karena mereka tidak berlaku eksklusif seperti yang dikatakan orang-orang. Pada beberapa kesempatan PITI beserta dengan masyarakat muslim Tionghoa bekerjasama untuk mengadakan berbagai macam keagamaan seperti pengajian bulanan, pengajian imlek bersama dan memperingati kurban bersama. Hal ini menandakan bahwa mereka terbuka dengan berbagai paham/mazhab yang berbeda demi mewujudkan kehidupan yang harmonis. Mereka memahami perbedaan paham yang berkembang di tengah kehidupan keagamaan mereka.

Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Masyarakat Minoritas Muslim Etnis Tionghoa di Yogyakarta

Moderasi adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah pilihan ekstrim yang ada. Kemudahan, berada di tengah-tengah, dan moderasi adalah karakteristik hukum Islam, dan bahkan karakteristik yang paling penting dari hukum Islam. Secara analogi, sifat moderat adalah seperti gerak dari tepi yang selalu cenderung ke pusat atau poros (sentripetal), sedangkan ekstremisme adalah gerak mundur menjauhi pusat atau poros, menuju sisi luar dan ekstrem (sentrifugal).

Sebagai sebuah organisasi, PITI DIY berhubungan dengan berbagai komponen masyarakat baik dalam internal organisasi PITI maupun dengan pihak dari luar atau eksternal organisasi. Hal demikian pula yang dilakukan oleh masyarakat muslim minoritas Tionghoa yang tinggal di Yogyakarta. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan sesama dan juga dengan muslim pribumi yang ada di Yogyakarta. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama dan dinilai sukses.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan PITI DIY masih diakui oleh pihak-pihak tersebut, di mana mereka adalah bagian dari masyarakat DIY. Oleh karena itu pula adaptasi yang dilakukan PITI DIY dengan anggota masyarakat. Pribumi dapat dikatakan tidak terlalu sulit. Bahkan berbagai program yang dilaksanakan oleh PITI Yogyakarta dan masyarakat muslim Tionghoa disambut baik oleh masyarakat luas.

Pada saat yang sama, mereka selalu menjaga sikap toleransi di antara muslim etnis Tionghoa, muslim pribumi dan non-muslim sekalipun. Toleransi dapat dipahami sebagai sebuah sikap yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menerima prinsip, prinsip, dan keyakinan seseorang tanpa meninggalkan prinsip dan keyakinannya sendiri. Dengan kata lain, toleransi bisa juga disebut sikap saling menghormati. Sikap toleransi muslim etnis Tionghoa Yogyakarta juga terlihat dalam perayaan hari raya imlek. Momentum Imlek dijadikan anggota Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) DIY untuk berkumpul dengan keluarga, kerabat dan masyarakat etnis Tionghoa. Mereka saling bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat yang jarang bertemu. Kegiatan ini akan menambah keharmonisan keluarga etnis Tionghoa sekaligus bernostalgia tentang zaman dulu.

Kerukunan masyarakat muslim minoritas etnis Tionghoa di Yogyakarta sejatinya buah dari sikap toleransi masyarakat yang kuat. Pada perbedaan yang terjadi baik dari segi keyakinan maupun pengamalan ritual keagamaan mereka anggap sebagai

khazanah/kekayaan yang membangun dan menyatukan. Sikap semacam ini adalah, sebagaimana yang disebutkan, sebuah bentuk moderasi beragama yang diwujudkan dalam bentuk melawan ekstrimisme dengan toleransi.

Dalam terma sosiologi, agama Islam di masyarakat muslim minoritas etnis Tionghoa Yogyakarta berperan sebagai faktor pemersatu. Sebab, keberadaan PITI Yogyakarta dan masyarakat muslim etnis Tionghoa mampu menyatukan berbagai macam elemen masyarakat Yogyakarta. Sebagaimana studi Hetiyanti, bahwa agama di satu sisi dapat menjadi faktor pemersatu dan di sisi lainnya dapat berperan sebagai pemecah belah. Agama dapat menjadi perekat batin pemeluknya, namun juga agama dapat dijadikan alat untuk meretakkan bahkan memecah persatuan masyarakat. Dalam hal ini, agama Islam mampu menyatukan ikatan bersama di antara muslim etnis Tionghoa di Yogyakarta dan masyarakat pribumi. Tidak hanya dalam urusan ritual keagamaan, namun agama Islam mampu berperan menyatukan mereka dalam kegiatan sosial.

Kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial merupakan dua hal utama dalam membangun toleransi antar umat beragama di muslim minoritas etnis Tionghoa di Yogyakarta. Lebih jauh, program yang dilaksanakan merupakan bentuk adaptasi dengan lingkungan mereka untuk bertahan hidup. Sikap toleransi juga diwujudkan dalam hal ritual keagamaan. Mereka mengikuti ritual yang dijalankan meski tidak sepaham. Misalnya mereka tetap mengikuti tahlilan, yasinan dan maulidan meski tidak sepenuhnya meyakini ajaran tersebut. Hal itu dilakukan guna tetap menjaga keharmonisan antar sesama anggota masyarakat.

Potret toleransi yang tergambarkan dalam masyarakat muslim etnis Tionghoa sebagai bentuk keseimbangan dalam tingkah laku dalam kemajemukan masyarakat. Bahwa moderat (*al-wasat*) adalah orang-orang yang selalu mampu menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keseimbangan dalam setiap tingkah laku dan perkataannya di tengah kemajemukan masyarakat, sehingga tercipta perdamaian dan toleransi tanpa adanya tindakan anarkisme dan eksklusivisme. Sikap *wasathiyah* sebagai orang-orang tengah, tidak ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Artinya juga masyarakat minoritas muslim etnis Tionghoa terbuka, toleran, dan menerima orang lain. Dengan demikian ditemukan sikap yang sesuai dengan prinsip Islam dan tradisi masyarakat, yaitu seimbang dalam akidah, ibadah dan akhlak. Sebab, agama itu sendiri sebenarnya moderat, yang perlu dimoderasi adalah sikap religius umat dalam mengatur kehidupannya.

Sikap toleran mereka terkadang tidak sebanding lurus dengan toleransi yang mereka dapatkan. Stigma negatif pada keturunan etnis Tionghoa masih mereka dapatkan. Mereka masih mendapatkan stigma negatif dari beberapa elemen masyarakat. Stigma negatif ini mereka nilai telah terpola sejak dulu sehingga susah untuk menghilangkannya. Stigma negatif tersebut biasanya dalam bentuk memandang bahwa muslim Tionghoa masih memiliki hubungan dengan paham komunisme di Indonesia. Padahal sejatinya masyarakat muslim Tionghoa di Yogyakarta terlahir di Indonesia, tumbuh di Indonesia dan menempuh pendidikan formal di Indonesia. Meski demikian, mereka tetap mengedepankan sikap toleransi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang disepakati bersama dan tidak larut dalam sikap apriori yang mereka dapatkan.

Sikap toleransi semacam itu, disebut oleh Yudhi sebagai kesadaran hidup bersama. Hak asasi semua saudara, tanpa memandang suku atau agama apa pun. Agama diharapkan tidak hanya untuk etnis tertentu tetapi juga untuk menjamin kesadaran hidup kebersamaan serta saling membantu antar umat beragama untuk mencapai kerukunan sosial. Pemahaman tentang keyakinan agama akan membawa kesejukan jika ditempatkan di setiap porsinya. Menjalankan keyakinan agama dan menghormati keyakinan orang lain tentu memberikan rasa damai, aman dan tenteram. Moderasi beragama merupakan sesuatu yang harus dihayati oleh setiap umat beragama, dan akan memberikan kesejukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap ini juga merupakan visi PITI dalam mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Misi PITI didirikan adalah untuk mempersatukan muslim Tionghoa dengan Muslim Indonesia, muslim Tionghoa dengan etnis Tionghoa non muslim dan etnis Tionghoa dengan umat Islam.

Simpulan

PITI Yogyakarta sebagai sebuah organisasi muslim minoritas mereka memegang prinsip Islam moderat “rahmatan lil alamin”. Prinsip tersebut pada saatnya mempengaruhi bagaimana sikap moderasi beragama mereka. Dimensi moderasi beragama masyarakat muslim minoritas etnis Tionghoa di Yogyakarta setidaknya tergambarkan melalui dua hal pokok. Pertama menyangkut paham keagamaan yang dianut. Kedua berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Pada dimensi paham keagamaan, masyarakat muslim Tionghoa di Yogyakarta didominasi oleh pengaruh ormas setempat. Dalam hal ini ormas NU dan Muhammadiyah merupakan dua ormas

yang paling banyak diikuti. Sedangkan dalam hal sosial, toleransi antar umat beragama merupakan kunci menjaga kerukunan dalam masyarakat. Sikap toleran diwujudkan dalam berbagai bidang, seperti keagamaan dan sosial. Dalam hal ini pula, agama berperan positif menyatukan ikatan bersama, baik diantara anggota-anggota masyarakat muslim etnis Tionghoa dengan muslim pribumi dan, lebih luas lagi, dengan masyarakat non muslim.

Referensi

- Afthonul, Afif. (2012). *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri*. Jawa Barat: Penerbit Kepik.
- Agus, Sudibyo. (2009). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Cetakan IV. Yogyakarta: LKiS.
- Akhmadi, Agus. (2019). "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia's Diversity." *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2).
- Ali, Suyuthi. (2001). *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Almu'tasim, Amru. (2019). "Berkaca NU Dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam Di Indonesia." *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 8(2). <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v8i2.474>.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asfiati, Asfiati. (2019). "Dinamika Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Islam Etnis Tionghoa Muslim di Kota Padangsidempuan." *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 7(2). <https://doi.org/10.29210/138200>.
- Atabik, Ahmad. (2016). "Harmonisasi Kerukunan Antar Etnis dan Penganut Agama di Lasem." *Fikrah*, 4(1). <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1511>.
- Carey, Petet. (1996). *Orang Jawa & Masyarakat Cina (1755-1825)*. Terj. Jakarta: Pustaka Azet.
- Darajat, Zakiya. (2017). "Muhammadiyah Dan NU: Penjaga Moderatisme Islam di Indonesia." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.21009/hayula.001.1.05>.
- Graaf, H. J. de, and M. C. Riclefs. (2004). *Cina Muslim: di Jawa Abad XV dan XVI; Antara Historisitas dan Mitos*. Cetakan Ke. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Hafidzi, Anwar. (2019). "Konsep Toleransi dan Kematangan Agama dalam Konflik Beragama di Masyarakat Indonesia." *Potret Pemikiran*, 23(2). <https://doi.org/10.30984/pp.v23i2.1003>.
- Husodo, Siswono Yudo. (1985). *Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia)*. Cet II. Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri.

- Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Junaedi, Edi. (2019). "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag." *Harmoni*, 18(2). <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>.
- Karim, H. Abdul. (1982). *Mengabdikan Agama, Nusa dan Bangsa*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Karim, Hamdi Abdul. (2019). "Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallah 'Alamin dengan Nilai-Nilai Islam." *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 4(01). <https://doi.org/10.32332/riayah.v4i01.1486>.
- Kawangung, Yudhi. (2019). "Religious Moderation Discourse in Plurality of Social Harmony in Indonesia." *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1). <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.277>.
- Khalwani, Ahmad. (2019). "Relasi Agama dan Negara dalam Pandangan Ibnu Khaldun." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 2(2). <https://doi.org/10.32699/resolusi.v2i2.993>.
- Mahaswara, Hamada Adzani. (2017). "Muslim Tionghoa Sebagai Jembatan Budaya: Studi tentang Partisipasi dan Dinamika Organisasi PITI Yogyakarta." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 2(1). <https://doi.org/10.22515/shahih.v2i1.704>.
- Masnur, Alam. (2017). "Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat dalam Mencegah Ancaman Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi." *Jurnal Islamika*, 17(2). <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/205>.
- Maulana, Rezza. (2011). "Pergulatan Identitas Tionghoa Muslim: Pengalaman Yogyakarta." *Kontekstualita*, 26(1).
- Miles, Matthew B., and Johnny Huberman, A. Michael, Saldana. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th Edition. London. UK: Sage Publications.
- Nasution, Khoiruddin. (2009). *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdemia Tazzafa.
- Noorhaidi, Hasan, ed. (2018). *Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropirasi, dan Kontestasi*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press.
- Perdana, Fahmi Rafika. (2017). "Integrasi Sosial Muslim-Tionghoa Studi atas Partisipasi PITI DIY dalam Gerakan Pembauran." *Jurnal Sosiologi Agama*, 9(2). <https://doi.org/10.14421/jsa.2015.092-06>.
- Ramli, Ramli. (2019). "Moderasi Beragama Bagi Minoritas Muslim Etnis Tionghoa di Kota Makassar." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 12(2). <https://doi.org/10.35905/kur.v12i2.1219>.
- Slamet, Muljana. (2005). *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*. LKiS Pelangi Aksara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumanto, Al Qurtuby. (2003). *Arus Cina-Islam-Jawa Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad XV & XVI*. Cet 1. Yogyakarta: Inspeal Press.

- Sunano. (2017). *Muslim Tionghoa di Yogyakarta*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Suryadinata, Leo. (2003). "Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: dari Asimilasi ke Multikulturalisme?" *Jurnal Antropologi Indonesia, Center of Anthropological Studies*, 3(71).
- Widodo, Priyantoro, and Karnawati Karnawati. (2019). "Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia." *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 15(2). <https://doi.org/10.46494/psc.v15i2.61>.
- Yunus, Firdaus M. (2014). "Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya." *Substantia*, 16(2).
- Zakiah. (2019). "Moderasi Beragama Masyarakat Menengah Muslim: Studi terhadap Majelis Taklim Perempuan Moderation of Religion Among the Middle Class Muslim: A Case Study of Women Religious Assembly in Yogyakarta." *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 18(2).